



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP

DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA BUKITTINGGI

**2017**

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DPMPTSPPTK  
2018


## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi merupakan perwujudan tanggungjawab atas kinerja pencapaian sasaran strategis pada tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DPMPTSPPTK 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sanga tinggi, yang tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien. Namun disadari masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. LKIP DPMPTSPPTK 2017 diharapkan dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bukittinggi, Januari 2018  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA BUKITTINGGI



**SYAHRIZAL, ST**  
NIP. 19611212 198602 1 002

## **DAFTAR ISI**

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I      PENDAHULUAN	1
1.1.    Latar Belakang	1
1.2.    Landasan Hukum	2
1.3.    Maksud dan Tujuan	2
1.4.    Tugas dan Wewenang Organisasi	3
1.5.    Struktur Organisasi	4
1.6.    Sistematika Penulisan	7
BAB II     PERENCANAAN KINERJA	8
2.1.    Perencanaan Kinerja	8
2.2.    Perjanjian Kinerja Tahun 2017	11
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1.    Capaian Kinerja Tahun 2017	13
3.2.    Realisasi Anggaran Tahun 2017	40
BAB IV    PENUTUP	48

## **DAFTAR TABEL**

		Hal
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2017	11
Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	13
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2017	14
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2016 dan Tahun 2017	15
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Renstra	16
Tabel 3.5	Perkembangan Penanaman Modal di Kota Bukittinggi Tahun 2017	19
Tabel 3.6	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPPTK Tahun 2017	22
Tabel 3.7	Rekap Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2016-2017 pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi	33
Tabel 3.8	Pencari Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan Tahun 2016-2017	38
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja DPMPTSPPTK Tahun 2017	40
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran dan Fisik DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2017	41

## **DAFTAR GAMBAR**

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	6
Grafik 3.1 Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Kota Bukittinggi Tahun 2015-2017	28

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **1.2. DASAR HUKUM**

Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2017, secara yuridis formal berlandaskan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi, identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

#### **1.4.TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Kota Bukittinggi menetapkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi . Adapun ruang lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

##### **1. Kedudukan**

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerjamerupakan unsur Pelaksana tugas Walikota dibidang Pelayanan Perizinan / Non Perizinan di Daerah dengan sistem satu pintu .
- b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerjadipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Tugas Pokok**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantu bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.

##### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

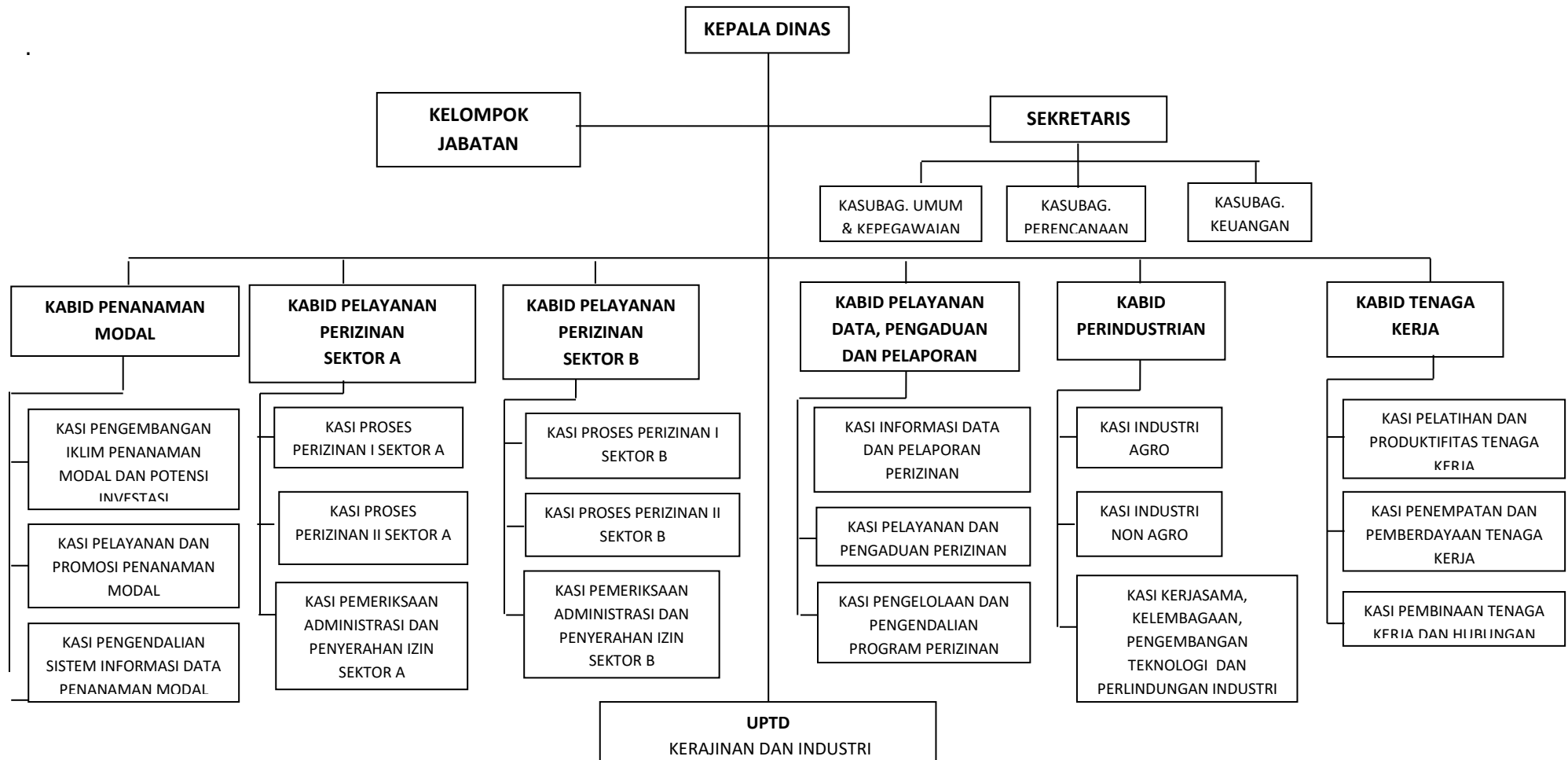
## **1.5. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Daerah Kota Bukittinggi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Kasubag Umum
  2. Kasubag Keuangan
  3. Kasubag Perencanaan
- c. Kabid Penanaman Modal
  1. Kasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Potensi Investasi
  2. Kasi Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal
  3. Kasi Pengendalian Sistem Informasi Data Penanaman Modal
- d. Kabid Pelayanan Perizinan Sektor A
  1. Kasi Proses Perizinan I Sektor A
  2. Kasi Proses Perizinan II Sektor A
  3. Kasi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor A
- e. Kabid Pelayanan Perizinan Sektor B
  1. Kasi Proses Perizinan I Sektor B
  2. Kasi Proses Perizinan II Sektor B
  3. Kasi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B
- f. Kabid Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan
  1. Kasi Informasi Data dan Pelaporan Perizinan

2. Kasi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan
3. Kasi Pengelolaan dan Pengendalian Program Perizinan
- g. Kabid Perindustrian
  1. Kasi Industri AGRO
  2. Kasi Industri Non AGRO
  3. Kasi Kerjasama,Kelembagaan,Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Industri
- h. Kabid Tenaga Kerja
  1. Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
  2. Kasi Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
  3. Kasi Pembinaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

**Gambar 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**



## **1.6.SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

### **Bab. I      PENDAHULUAN**

Mengemukakan uraian singkat tentang organisasi, kedudukan dan tugas pokok dan fungsi organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, struktur organisasi secara garis besar dan bagaimana antar bagian bersinergi mencapai sasaran dan tujuan, gambaran tentang apa yang diharapkan masyarakat dan Stakeholder atas keberadaan organisasi.

### **Bab II      PERENCANAAN KINERJA**

Berisikan Visi, Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Organisasi, Sasaran, Program, Kegiatan yang ingin dicapai dan indikator serta target dan Rencana Kerja yang dituangkan dalam anggaran atau anggaran yang tersedia untuk mewujudkan kinerja yang diinginkan.

### **Bab III      AKUNTABILITAS KINERJA.**

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Kinerja Sasaran Strategis, Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Strategis. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja DPMP7SPPTK Kota Bukittinggi.

### **Bab IV      PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerjadidasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja. Adapun dokumen Renstra tersebut memuat :

##### **a. Visi dan Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Bukittinggi pada RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021 yaitu: **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**, maka dirumuskanlah kerangka pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun dalam Renstra DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2016-2021.

Adapun Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah **“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Pelayanan Perizinan yang Prima serta Industri dan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing”**. Sedangkan misi sebagai penjabaran dari visi dimaksud, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi menetapkan misi untuk 4 (empat) tahun kedepan (2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif
2. Menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan akuntabel.
3. Mewujudkan Industri Kecil Menengah yang mandiri dan berdaya saing.
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, penegakkan hukum ketenagakerjaan, kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

**b. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Berdasarkan Visi dan misi diatas, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
3. Meningkatkan daya saing Industri Kecil Menengah
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Sasaran Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai dengan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berdaya saing
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Industri Kecil Menengah
4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
5. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan SAKIP.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra 2016	Target Kinerja pada Th Ke					Kondisi Akhir Renstra 2021
					1	2	3	4	5	
1	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif	Mewujudkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berdaya saing	Jumlah Investasi (Triliyun Rupiah)	1,884	2,073	2,280	2,507	2,759	3,035	3,035

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*  
*DPMPD SPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2017*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra 2016	Target Kinerja pada Th Ke					Kondisi Akhir Renstra 2021
					1	2	3	4	5	
2	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82	84	86	88	90	92	92
3	Meningkatkan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM)	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM (%)	2	2	4	6	8	10	10
			Persentase pertumbuhan tenaga kerja IKM (%)	1.5	1.5	3	4.5	6	7.5	7.5
			Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM (%)	1.5	1.5	3	4.5	6	7.5	7.5
			Persentase Penambahan investasi IKM (%)	1.5	1.5	3	4.5	6	7.5	7.5
			Persentase industri yang memiliki izin usaha SITU/SIUP/TDI /IUI (unit)	1.5	1.5	3	4.5	6	7.5	7.5
4	Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Persentase Besaran Kasus Hubungan Industrial yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	80	82	84	86	87	88	88
			Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (%)	20	23	32	45	68	91	91
		Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,6	70,25	71,15	73,45	76,33	77	77
			Tingkat pengangguran terbuka	5,88	5,84	5,70	5,50	5,00	4,93	4,93
			Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (%)	15	17	19	21	23	25	25
5	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	A	A

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam periode satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala DPMPTSPPTK dengan Walikota Bukittinggi untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan didukung sumber daya dan dana yang dimiliki oleh DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi. Berikut ini Perjanjian Kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2017 :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berdaya saing	Jumlah investasi	2,073 Triliyun Rupiah
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	2%
		Persentase pertumbuhan tenaga kerja IKM	1,5%
		Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM	1,5%
		Persentase penambahan investasi IKM	1,5%
		Persentase industri yang memiliki izin usaha SITU/SIUP/TDI/UI	1,5%
4	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	82%
		Persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB	23%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,25%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,84%
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	17%
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP	B

Dalam mencapai target Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam intern Dinas disusun Perjanjian Kinerja antara eselon III dengan eselon II dan eselon IV dengan eselon III berdasarkan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing pejabat terkait (terlampir).

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017**

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban kinerja atas target- target kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2017 yang memuat realisasi dari suatu instansi pemerintah. Pada dasarnya ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, serta analisis akuntabilitas keuangan.

Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2017. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Dari data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dilakukan berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Berikut capaian kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2017 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET
1	Mewujudkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berdaya saing	Jumlah investasi	2,073 Triliyun Rupiah	5,8 Triliyun Rupiah	279,79%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	82,89%	98,67%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	2%	0,70%	35%	Sangat Rendah
		Persentase pertumbuhan tenaga kerja IKM	1,5%	0,54%	36%	Sangat Rendah
		Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM	1,5%	1,19%	79,3%	Tinggi
		Persentase penambahan investasi IKM	1,5%	1,30%	86,67%	Tinggi
		Persentase industri yang memiliki izin usaha SITU/SIUP/TDI /IUI	1,5%	3,04%	202,67%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	82%	65,5%	79,88%	Tinggi
		Persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB	23%	10,83%	47,08%	Sangat Rendah
5	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,25%	67,59%	96,21%	Sangat Tinggi
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,84%	6,04%	103,42%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	17%	29,9%	42,11%	Sangat Rendah
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP	B	B	100%	Sangat Tinggi
		Rata-rata Capaian Kinerja			101,21%	Sangat Tinggi

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2017 merupakan tahun pertama dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Perindustrian dan Tenaga Kerja yang sebelumnya merupakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Namun indikator masih dapat dibandingkan dengan tahun lalu. Berikut perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2016 dan 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			2016	2017
1	Mewujudkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berdaya saing	Jumlah investasi	1,787 Triliyun Rupiah	5,8 Triliyun Rupiah
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,56%	82,89%
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	0,85%	0,70%
		Persentase pertumbuhan tenaga kerja IKM	0,64%	0,54%
		Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM	0,67%	1,19%
		Persentase penambahan investasi IKM	1,4%	1,30%
		Persentase industri yang memiliki izin usaha SITU/SIUP/TDI/IUI	2,98%	3,04%
4	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase besaran kasus hubungan industrial yang	53,12%	65,5%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			2016	2017
		diselesaikan dengan Perjanjian Bersama		
		Persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB	6,67%	10,83%
5	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,59%	67,59%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,04	6,04%
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	20,2%	29,9%
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP	B	B

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tahun 2017 merupakan tahun pertama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah baru. Secara umum telah mencapai target tahunan, namun belum mencapai target akhir Rencana Strategis 2016-2021. Persentase capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Renstra**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN S/D 2016 TERHAD AP 2021
			2016	2017				
				TARGET	REALISASI	%		
1	Mewujudkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berdaya saing	Jumlah investasi	1,787 Triliyun Rupiah	2,073 Triliyun Rupiah	5,8 Triliyun Rupiah	279,79 %	3,035 Triliyun Rupiah	191,10%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,56	84%	82,89%	98,67 %	92%	90,09%
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	0,85%	2%	0,70%	35%	10%	7%
		Persentase pertumbuhan tenaga kerja IKM	0,64%	1,5%	0,54%	36%	7,5%	7.2%
		Persentase pertumbuhan nilai produksi	0,67%	1,5%	1,19%	79,3%	7,5%	15,87%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN S/D 2016 TERHADAP 2021
			2016	2017				
				TARGET	REALISASI	%		
		IKM						
		Persentase penambahan investasi IKM	1,4%	1,5%	1,30%	86,67 %	7,5%	17,33%
		Persentase industri yang memiliki izin usaha SITU/SIUP/TDI /IUI	2,98%	1,5%	3,04%	202,67 %	7,5%	40,53%
4	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	53,12%	82%	65,5%	79,88 %	88%	74,43%
		Persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB	6,67%	23%	10,83%	47,08 %	91%	11,90%
5	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,59%	70,25%	67,59%	96,21 %	77%	87,78%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,04%	5,84%	6,04%	103,42 %	4,93%	22,51%
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	20,2%	17%	29,9%	175,88 %	25%	119,6%
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP	B	B	B	100%	A	50%

#### 4. Analisis Capaian Kinerja

##### 4.1.Sasaran 1: Mewujudkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Berdaya Saing

Indikator kinerja dari pencapaian sasaran Mewujudkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Berdaya Saing di Kota Bukittinggi adalah Jumlah Investasi (Triliyun Rupiah). Berikut analisis capaian kinerja sasaran ini sebagai berikut:

- Target untuk tahun 2017 adalah sebesar 2,073 Triliyun Rupiah dan terealisasi sebesar 5,8Triliyun Rupiah, yaitu PT. Tower Bersama, PT. Solusindo Kreasi Pratama dan PT. Semoga Aslam Terkawal. Hal ini berarti realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 279,79%.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET
1	Mewujudkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berdaya saing	Jumlah investasi	2,073 Triliyun Rupiah	5,8 Triliyun Rupiah	279,79%	Sangat Tinggi

- b. Untuk perbandingan dengan capaian tahun 2016 dan 2017, dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 94,85% dan capaian realisasi tahun 2017 sebesar 265,32%. Artinya terjadi peningkatan capaian realisasi kinerja pada indikator kinerja ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			2016	2017
1	Mewujudkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berdaya saing	Jumlah investasi	1,787 Triliyun Rupiah	5,8 Triliyun Rupiah

- c. Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja target indikator Jumlah Investasi sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 3,035 Triliyun Rupiah, dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 5,8 Triliyun Rupiah, maka realisasi dari capaian kinerja jangka menengah sampai tahun 2017 adalah sebesar 191,10%.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN S/D 2016 TERHADAP 2021
			2016	2017				
				TARGET	REALISASI	%		
1	Mewujudkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berdaya saing	Jumlah investasi	1,787 Triliyun Rupiah	2,073 Triliyun Rupiah	5,8 Triliyun Rupiah	279,79 %	3,035 Triliyun Rupiah	191,10%

- d. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah karena semakin besarnya minat investor untuk melakukan investasi di Kota Bukittinggi karena memiliki potensi dalam pengembangan usaha sebagai salah satu Kota tujuan wisata di Sumatera Barat. Hal ini juga didukung oleh promosi investasi yang dilakukan melalui kegiatan promosi investasi.

Tingginya capaian kinerja pada sasaran ini diakibatkan oleh rendahnya target kinerja yang telah dirumuskan sebelumnya dalam Rensta DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2016-2021. Hal ini menjadi catatan tersendiri dalam perumusan target kinerja di masa yang akan datang. Data penanaman modal pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 5**  
**Perkembangan Penanaman Modal di Kota Bukittinggi Tahun 2017**

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi Usaha	Nilai Investasi
1.	PT. Tower Bersama	Konstruksi Sentral Komunikasi	The Convergency Indonesia Lt. 11 Kawasan Epicentrum, Hl. HR. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi	5.439.345.000.000
2.	PT. Solusindo Kreasi Pratama	Konstruksi Sentral Komunikasi	The Convergence Indonesia II, Jl. HR. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi	442.833.200.000
3.	PT. Semoga Aslam Terkawal	Perdagangan Ritel (Mini Market)	Jln. Veteran Kel. Puhun Tembok Kec. Mandiangin Koto Salayan	630.750.000

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran Mewujudkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Berdaya Saing

No.	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja	Sumber Dana
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		
1.	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri	2 kali pameran/expo	APBD
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>		
1.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	APBD
2.	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UKM	50 orang pengusaha yang mengikuti sosialisasi	APBD
<b>III</b>	<b>Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana</b>		
1.	Penyusunan Kajian Sumberdaya Potensi Investasi	1 dokumen potensi investasi	APBD

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah investasi baik PMDN dan PMA ke Kota Bukittinggi. Program ini mendapat alokasi dana sebesar



Rp.117.246.600,- dengan realisasi sebesar Rp.47.608.630,- dan tingkat realisasi mencapai angka 40,65%.

a) Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pameran investasi yang diikuti, yang ditargetkan sebanyak 2 kali terealisasi 1 kali, maka dialokasikan dana sebesar Rp.117.246.600,- terealisasi Rp.47.608.630,- dan tingkat realisasi 40,65% dengan realisasi fisik 50%. Tidak optimalnya capaian kinerja dan anggaran disebabkan pelaksanaan Sumatera Barat Expo tidak dapat diikuti karena berbarengan dengan kegiatan lain pada Bidang Penanaman Modal.

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah investor yang datang ke Kota Bukittinggi untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.17.334.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.817.500,- dan tingkat realisasi mencapai angka 91,25%.

a) Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Usaha Besar dan UKM

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah UKM yang mengikuti peningkatan fasilitas kerjasama dengan Usaha Besar dengan target sebanyak 50 orang peserta, maka dialokasikan dana sebesar Rp.14.060.000,- terealisasi Rp.13.163.500 dan tingkat realisasi 93,62% dengan realisasi fisik 100%.

b) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen peningkatan kegiatan penanaman modal dengan target 1 dokumen, maka dialokasikan dana sebesar Rp.3.274.000,- terealisasi Rp.2.654.000,- dan tingkat realisasi 81,06% dengan realisasi fisik 100%.

3) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Program ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan data dan informasi mengenai peluang investasi yang ada di Kota Bukittinggi. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.50.731.250,- dengan realisasi sebesar Rp.46.522.275,- dan tingkat realisasi mencapai angka 91,70%.

a) Kegiatan Penyusunan Kajian Sumberdaya Potensi Investasi

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen kajian sumberdaya potensi investasi, dengan target 1 dokumen, maka dialokasikan dana sebesar Rp.50.731.250,- terealisasi Rp.46.522.275 dan tingkat realisasi 91,70% dengan realisasi fisik 100%.

4.2.Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Indikator kinerja dari pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan di Kota Bukittinggi adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berikut analisis capaian kinerja sasaran ini sebagai berikut:

- a. Target untuk tahun 2017 adalah sebesar 84% dan terealisasi sebesar 82,89% Hal ini berarti capaian realisasi jika dibandingkan dengan target yaitu sebesar 98,67% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	82,89%	98,67%	Sangat Tinggi

- b. Untuk perbandingan dengan capaian tahun 2016 dan 2017, dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 82,56% dan capaian realisasi tahun 2017 sebesar 82,89%. Artinya terjadi peningkatan capaian realisasi kinerja pada indikator kinerja ini walaupun belum mencapai target yang ditentukan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			2016	2017
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,56%	82,89%

- c. Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 92%, dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 82,89%, maka realisasi dari capaian kinerja jangka menengah sampai tahun 2017 adalah sebesar 90,09%.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN S/D 2016 TERHAD AP 2021
			2016	2017				
				TARGET	REALISASI	%		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,56	84%	82,89%	98,67 %	92%	90,09%

- d. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Walaupun realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan tetapi capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dikategorikan sangat baik dan nilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,89% pada tahun 2017 mencerminkan mutu pelayanan perizinan pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi pada kategori sangat baik.

Hasil survey IKM selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 14 (empat belas) variable sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Berikut dapat dilihat unsur pelayanan dan nilai rata-rata nya sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**DPMPTSPPTK Tahun 2017**

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Prosedur pelayanan	3,220
U2	Persyaratan pelayanan	3,347
U3	Kejelasan petugas pelayanan	3,407
U4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,280
U5	Tanggungjawab petugas pelayanan	3,387
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3,360
U7	Kecepatan petugas pelayanan	3,160
U8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,280
U9	Kesopanan dan keramahan petugas	3,373
U10	Kewajaran biaya pelayanan	3,373
U11	Kepastian biaya pelayanan	3,393
U12	Kepastian jadwal pelayanan	3,280
U13	Kenyamanan lingkungan	3,423
U14	Keamanan lingkungan	3,413

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
	Nilai IKM	82,89%
	Nilai Mutu Pelayanan	A
	Kategori Kinerja Pelayanan	Sangat Baik

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

No.	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja	Sumber Dana
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat</b>		
1.	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	50 Laporan	APBD
2.	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	86 Jenis izin	APBD
3.	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Umum dan Teknis	3700 berkas izin	APBD
4.	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	60 kasus	APBD
5.	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	3 dokumen	APBD
6.	Pelayanan Perizinan Umum	2500 izin	APBD
7.	Pelayanan Perizinan Teknis	1200 izin	APBD
8.	Tim Koordinasi Perizinan	1 laporan	APBD
9.	Pengawasan Tempat Usaha	90 perusahaan	APBD

1) Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini terkait pelayanan perizinan bidang penanaman modal. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.296.230.200,- dengan realisasi sebesar Rp.248.054.850,- dan tingkat realisasi mencapai angka 83,74%.

a) Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jenis izin yang dikelola secara online dalam pelayanan perizinan pada DPMPTSPPTK dengan target 86 jenis izin terealisasi 40 jenis izin, maka dialokasikan dana sebesar Rp.11.672.200,- terealisasi Rp.10.885.500,- dan tingkat realisasi 93,26% dengan realisasi fisik 48,19%. Tidak optimalnya capaian kinerja disebabkan masih perlu pengembangan dalam aplikasi

perizinan on line sehingga semua jenis izin dapat dilayani secara online.

b) Kegiatan Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Umum dan Perizinan Teknis

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi dengan target 3700 berkas izin terealisasi 3700 berkas izin, maka dialokasikan dana sebesar Rp.3.019.000,- terealisasi Rp.2.812.500,- dan tingkat realisasi 93,16% dengan realisasi fisik 100%.

c) Kegiatan Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah peraturan perizinan yang tersusun dengan target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen, maka dialokasikan dana sebesar Rp.12.488.000,- terealisasi Rp.11.377.050,- dan tingkat realisasi 91,10% dengan realisasi fisik 100%.

d) Kegiatan Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengaduan terkait izin yang telah diterbitkan, diproses dan tertangani dengan baik dengan target 60 kasus terealisasi 20 kasus, maka dialokasikan dana sebesar Rp.12.337.000,- terealisasi Rp.11.003.000,- dan tingkat realisasi 89,19% dengan realisasi fisik 33,33%. Tidak optimalnya capaian kinerja disebabkan pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada jumlah kasus pengaduan perizinan yang masuk ke DPMPTSPPTK selama 1 tahun.

e) Kegiatan Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pelaporan dokumentasi perizinan yang dilakukan dengan target 50 laporan terealisasi 48 laporan, maka dialokasikan dana sebesar Rp.55.927.000,- terealisasi Rp.51.198.775,- dan tingkat realisasi 91,54% dengan realisasi fisik 96%.

f) Kegiatan Pelayanan Perizinan Umum

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah surat izin umum yang diterbitkan dengan target 2500 surat izin terealisasi 1738 surat izin, maka dialokasikan dana sebesar Rp.67.593.000,- terealisasi Rp.43.046.700,- dan tingkat realisasi 63,68% dengan realisasi fisik

69,52%. Tidak optimalnya capaian kinerja dan anggaran disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelayanan perizinan umum yang bergantung pada pengajuan izin umum dari masyarakat. Solusinya akan terus ditingkatkan sosialisasi perizinan terhadap masyarakat melalui berbagai media.

g) Kegiatan Pelayanan Perizinan Teknis

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah surat izin teknis yang diterbitkan dengan target 1200 surat izin terealisasi 1610 surat izin, maka dialokasikan dana sebesar Rp.111.063.000,- terealisasi Rp.98.429.275,- dan tingkat realisasi 88,62% dengan realisasi fisik 134,17%.

h) Kegiatan Pengawasan Tempat Usaha

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap tempat usaha yang belum memiliki izin usaha dengan target 90 perusahaan terealisasi 90 perusahaan, maka dialokasikan dana sebesar Rp.18.201.000,- terealisasi Rp.16.985.450,- dan tingkat realisasi 93,32% dengan realisasi fisik 100%.

i) Tim Koordinasi Perizinan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah jumlah dokumen hasil koordinasi mengenai perizinan dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, maka dialokasikan dana sebesar Rp.3.930.000,- terealisasi Rp.2.316.600,- dan tingkat realisasi 58,94% dengan realisasi fisik 100%. Tidak optimalnya penyerapan anggaran disebabkan kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi bersama SKPD/Instansi terkait menyakut izin yang akan dikeluarkan, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai kebutuhan.

#### 4.3.Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Kecil Menengah

Indikator kinerja dari pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Kecil Menengah di Kota Bukittinggi adalah:

- Persentase pertumbuhan unit usaha IKM
- Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM
- Persentase penambahan nilai investasi IKM

- Persentase industri yang memiliki izin usaha SITU/SIUP/TDI/IUI

Berikut analisis capaian kinerja sasaran ini sebagai berikut:

- a. Target tahun 2017 untuk indikator persentase pertumbuhan unit usaha IKM adalah sebesar 2% dan realisasinya 0,70% dengan persentase capaian sebesar 35% dengan penilaian sangat rendah. Untuk indikator persentase pertumbuhan tenaga kerja IKM ditargetkan sebesar 1,5% dan realisasi sebesar 0,54% dengan persentase capaian sebesar 36% dengan penilaian sangat rendah. Untuk indikator kinerja pertumbuhan nilai produksi IKM yang ditargetkan 1,5% dan tercapai dengan realisasi 1,19% dengan persentase capaian 79,3% dan penilaian dengan kategori tinggi. Dan untuk indikator persentase penambahan investasi IKM yang ditarget 1,5% tercapai 1,3% dengan tingkat capaian sebesar 86,67% dengan kategori tinggi. Sedangkan untuk indikator persentase industri yang memiliki izin usaha SITU/SIUP/TDI/IUI yang ditargetkan 1,5% tercapai sebesar 3,04% dengan tingkat capaian 202,67% yang dapat dikategorikan sangat tinggi.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	2%	0,70%	35%	Sangat Rendah
		Persentase pertumbuhan tenaga kerja IKM	1,5%	0,54%	36%	Sangat Rendah
		Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM	1,5%	1,19%	79,3 %	Tinggi
		Persentase penambahan investasi IKM	1,5%	1,30%	86,67 %	Tinggi
		Persentase industri yang memiliki izin usaha SITU/SIUP/TDI/IUI	1,5%	3,04%	202,67 %	Sangat Tinggi

- b. Untuk perbandingan dengan capaian tahun 2016 dan 2017, dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 82,56% dan capaian realisasi tahun 2017 sebesar 82,89%. Artinya terjadi peningkatan capaian realisasi kinerja pada indikator kinerja ini walaupun belum mencapai target yang ditentukan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			2016	2017
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Industri Kecil	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	0,85%	0,70%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			2016	2017
	Menengah	Persentase pertumbuhan tenaga kerja IKM	0,64%	0,54%
		Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM	0,67%	1,19%
		Persentase penambahan investasi IKM	1,4%	1,30%
		Persentase industri yang memiliki izin usaha SITU/SIUP/TDI/IUI	2,98%	3,04%

- c. Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 92%, dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 82,89%, maka realisasi dari capaian kinerja jangka menengah sampai tahun 2017 adalah sebesar 90,09%.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN S/D 2016 TERHAD AP 2021
			2016	2017				
				TARGET	REALISASI	%		
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	0,85%	2%	0,70%	35%	10%	7%
		Persentase pertumbuhan tenaga kerja IKM	0,64%	1,5%	0,54%	36%	7,5%	7.2%
		Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM	0,67%	1,5%	1,19%	79,3%	7,5%	15,87%
		Persentase penambahan investasi IKM	1,4%	1,5%	1,30%	86,67 %	7,5%	17,33%
		Persentase industri yang memiliki izin usaha SITU/SIUP/TDI /IUI	2,98%	1,5%	3,04%	202,67 %	7,5%	40,53%

- d. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

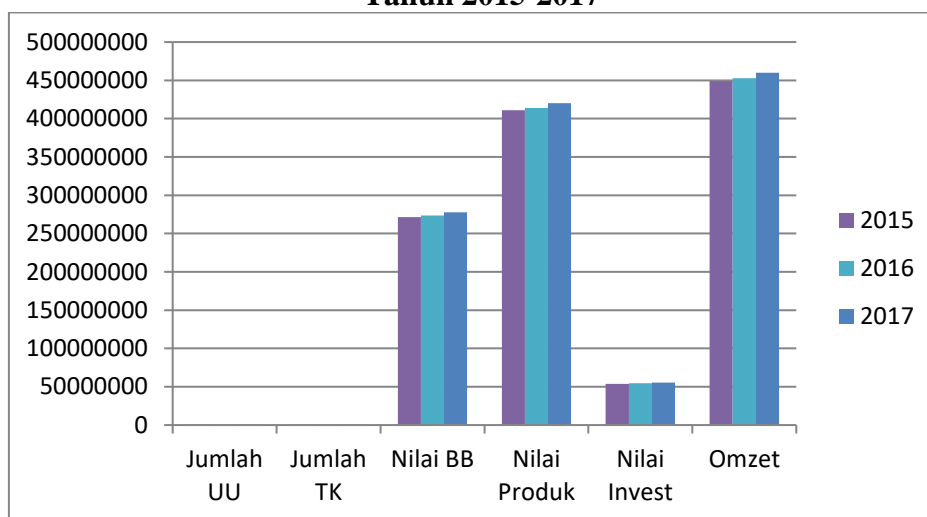
Keberhasilan realisasi kinerja untuk capaian indikator pada sasaran ini yang terdiri dari 5 indikator kinerja yaitu 1 indikator kinerja persentase industri yang memiliki izin usaha SITU/SIUP/TDI/IUI dengan kategori sangat tinggi (202,67%), 2 indikator kinerja persentase pertumbuhan unit usaha IKM dan persentase pertumbuhan tenaga kerja IKM dengan kategori sangat rendah (35% dan 36%) dan 2 indikator persentase pertumbuhan nilai produksi IKM dan



persentase penambahan investasi IKM dengan kategori tinggi (79,3% dan 86,67%).

Walaupun indikator kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan tetapi jika dilihat dari data perkembangan pada masing-masing indikator kinerja yang terus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2017, dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 3.1**  
**Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2015-2017**



- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Industri Kecil Menengah

No.	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja	Sumber Dana
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</b>		
1.	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	5 IKM	APBD
<b>II.</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>		
1.	Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi	30 orang	APBD
2.	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	25 org; 15 org; 25 org; 31 org	APBD
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>		

No.	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja	Sumber Dana
1.	Perluasan penerapan standar Produksi Industri Manufaktur	5 IKM; 25 IKM	APBD
2.	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	25 IKM; 10 IKM	APBD
3.	Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	12 Bulan	APBD
IV.	Program Pengembangan Sentra-sentra Potensial		
1.	Penumbuhan Sentra Potensial	5 KUB	APBD

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah industry kecil yang berkembang, yang dapat dilihat dari perkembangan unit usahanya. Program ini dilakukan dengan berbagai macam bentuk pembinaan dan fasilitasi terhadap IKM yang ada di Kota Bukittinggi. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.536.849.150,- dengan realisasi sebesar Rp.516.003.550,- dan tingkat realisasi mencapai angka 96,12%.

a) Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta yang mendapat fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya produksi, pesertanya berasal dari IKM dengan target 30 orang terealisasi 30 orang, maka dialokasikan dana sebesar Rp.46.751.400,- terealisasi Rp.46.751.400,- dan tingkat realisasi 100% dengan realisasi fisik 100%.

b) Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan aneka sulam dengan target 25 orang terealisasi 25 orang; jumlah peserta pelatihan tenun dengan target 15 orang terealisasi 15 orang; jumlah peserta pelatihan membatik dengan target 25 orang terealisasi 25 orang dan jumlah peserta produk unggulan daerah dengan target 31 orang terealisasi 31 orang, maka dialokasikan dana sebesar Rp.490.097.750,- terealisasi Rp.469.252.150,- dan tingkat realisasi 95,75% dengan realisasi fisik 100%.

2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai penjualan industry kecil menengah dengan memberikan pembinaan dan fasilitasi dalam pengembangan industri. Program ini mendapat alokasi dana sebesar 266.117.350,- dengan realisasi sebesar Rp.240.414.405,- dan tingkat realisasi mencapai angka 90,34%.

a) Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta sosialisasi, penerapan dan konvensi GKM dengan target 5 IKM terealisasi 5 IKM, maka dialokasikan dana sebesar Rp.24.374.600,- terealisasi Rp.23.572.800,- dan tingkat realisasi 96,71% dengan realisasi fisik 100%.

b) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah IKM yang difasilitasi label halal terhadap industry makanan dengan target 10 IKM terealisasi 10 IKM; jumlah peserta sosialisasi dan fasilitasi peacking industry makanan ringan dengan target 25 IKM terealisasi 25 IKM, maka dialokasikan dana sebesar Rp.99.443.750,- terealisasi Rp.81.600.915,- dan tingkat realisasi 82,06% dengan realisasi fisik 100%.

c) Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemenuhan penyelenggaraan operasional UPTD Kerajinan Industri dengan target 12 bulan terealisasi 12 bulan, maka dialokasikan dana sebesar Rp.142.299.000,- terealisasi Rp.135.240.690,- dan tingkat realisasi 95,04% dengan realisasi fisik 100%.

3) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan anggota KUB (Kelompok Usaha Bersama). Program ini mendapat alokasi dana sebesar 96.799.300,- dengan realisasi sebesar Rp.93.496.550,- dan tingkat realisasi mencapai angka 96,59%.

a) Pertumbuhan Sentra Potensial

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta yang mendapat pendampingan dengan target 5 KUB terealisasi 5 KUB, maka dialokasikan dana 96.799.300,- dengan realisasi sebesar

Rp.93.496.550,- dan tingkat realisasi mencapai angka 96,59% dengan realisasi fisik 100%.

4) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai produksi IKM. Program ini mendapat alokasi dana sebesar 10.874.700,- dengan realisasi sebesar Rp.10.824.600,- dan tingkat realisasi mencapai angka 99,54%.

a) Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah IKM yang dikembangkan dengan target 5 IKM terealisasi 5 IKM, maka dialokasikan dana 10.874.700,- dengan realisasi sebesar Rp.10.824.600,- dan tingkat realisasi mencapai angka 99,54% dengan realisasi fisik 100%.

4.4.Sasaran 4: Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja

Indikator kinerja dari pencapaian sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja di Kota Bukittinggi adalah:

- Persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
- Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Berikut analisis capaian kinerja sasaran ini sebagai berikut:

- a. Target tahun 2017 untuk indikator kinerja persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama ditargetkan sebesar 82% realisasi capaian 65,5% dengan tingkat capaian 79,88% dan dikategorikan tinggi. Dan untuk indikator kinerja persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB ditargetkan sebesar 23% terealisasi 10,83% dengan tingkat capaian kinerja 47,08% yang dikategorikan sangat rendah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET
4	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	82%	65,5%	79,88%	Tinggi
		Persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB	23%	10,83%	47,08%	Sangat Rendah

- b. Untuk perbandingan dengan capaian tahun 2016 dan 2017, dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 53,12% dan capaian realisasi tahun 2017 sebesar 65,5% untuk indikator persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama. Sedangkan untuk indikator persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB capaian tahun 2016 sebesar 6,67% dan tahun 2017 sebesar 10,83%. Artinya terjadi peningkatan capaian realisasi kinerja pada indikator kinerja ini walaupun belum mencapai target yang ditentukan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			2016	2017
4	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	53,12%	65,5%
		Persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB	6,67%	10,83%

- c. Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja target indikator Persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sampai dengan tahun 2021 yaitu sebesar 88%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar 65,5%, maka realisasi capaian kinerja jangka menengah sampai tahun 2017 sebesar 74,43%. Untuk indikator persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB target indikator sampai dengan tahun 2021 sebesar 91%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 10,83%, maka realisasi dari capaian kinerja jangka menengah sampai tahun 2017 sebesar 11,90%.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN S/D 2016 TERHAD AP 2021
			2016	2017				
				TARGET	REALISASI	%		
4	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	53,12%	82%	65,5%	79,88 %	88%	74,43%
		Persentase perusahaan	6,67%	23%	10,83%	47,08 %	91%	11,90%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN S/D 2016 TERHAD AP 2021
			2016	2017				
				TARGET	REALISASI	%		
		yang memiliki PP dan PKB						

- d. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Tingkat capaian indikator persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama tahun 2017 sebesar 79,88% dapat dikategorikan tinggi.

- Pada tahun 2017 dari 29 kasus hubungan industrial diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 19 PB dan sisanya penyelesaian dengan anjuran
- Pada tahun 2016 dari 32 kasus hubungan industrial diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 17 PB dan sisanya dengan anjuran.

Sedangkan persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB dikategorikan sangat rendah, pada tahun 2016 tercapai 6,67% dan tahun 2017 sebesar 10,83%. Berikut dapat dilihat rekap pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2016 dan 2017:

**Tabel 3.7**  
**Rekap Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2016-2017 pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi**

NO	NAMA/ALAMAT PERUSAHAAN	NO/TGL. SURAT	PERIHAL	NO/TGL. PENGESAHAN
<b>TAHUN 2016</b>				
1.	PT. BPR Jam Gadang Jln. Soekarno Hatta No. 52A Bukittinggi	18/02/2016	Pengesahan PP	No. 01/PP/II/2016 29-2-2016
2.	Hotel Limas Bukittinggi Jln. Kesehatan	18/5/2016	Pengesahan PP	No. 02/PP/VIII/2016 08-8-2016
3.	Hotel Ambun Suri Jln. Panorama No. 2 Bukit Cangang Kayu Ramang Guguk Panjang Bukittinggi	15/8/2016	Pengesahan PP	No. 03/PP/XIII/2016 08-8-2016
4.	Rumah Sakit Madina	29/6/2016	Pengesahan PP	No. 04/PP/XIII/2016 01-8-2016
5.	Hotel BUnda Jln. Panorama Bukittinggi No. 6 Bukittinggi	30/8/2016	Pengesahan PP	No. 05/PP/XIII/2016 01-8-2016
6.	Royal Denai Hotel Jln. A. Rivai No. 26 Bukittinggi	19/11/2016	Pengesahan PP	No. 06/PP/XI/2016 28-11-2016
7.	PT. Tusamatel Jln. Nabawi No. 8E Bukittinggi	18/10/2016	Pengesahan PP	No. 07/PP/XI/2016

NO	NAMA/ALAMAT PERUSAHAAN	NO/TGL. SURAT	PERIHAL	NO/TGL. PENGESAHAN
8.	Hotel Pusako Jln. Soekarno Hatta No. 7 Bukittinggi	12/10/2016	Pendaftaran PKB	No. 01/PKB/I/2016 29-2-2016
<b>TAHUN 2017</b>				
1.	Hotel Grand Malindo Jln. Panorama No. 30 Bukittinggi	24-8-2016	Pengesahan PP	No. 001/PP/I/2017 29-2-2017
2.	Hotel Mersi Jln. Panorama No. 30 Bukittinggi	15-11-2017	Pengesahan PP	No. 002/PP/XI/2017 17-11-2017
3.	Kopegtel Bukittinggi Jln. Nawawi No. 8E Bukittinggi	24-11-2017	Pengesahan PP	No. 003/PP/XII/2017 08-12-2017
4.	Yayasan Dwi Farma Jln. Bukit APit Gang Jambak Muko No. 15 Bukittinggi	27-11-2017	Pengesahan PP	No. 004/PP/XII/2017 18-12-2017
5.	Novotel Hotels & Resort Bukittinggi Jln. Laras Datuk Bandaro No. 01 Bukittinggi	06-11-2017	Pendaftaran PKB	No. 001/PKB/XII/2017 12-12-2017

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja

No.	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja	Sumber Dana
<b>I</b>	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>		
1.	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	30 Kasus	APBD
2.	Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan	10 Perusahaan	APBD
3.	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	5 Perusahaan	APBD

1) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Sehingga terjalin hubungan yang baik antara pekerja dan pemilik perusahaan. Anggaran yang dialokasikan

untuk mendukung program ini yakni sebesar Rp.78.617.750,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.62.093.500,- (78,98%)

a) Penanganan Kasus PHI

Indikator kinerja kegiatan ini adalah kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang diproses dengan target sebanyak 30 kasus maka dialokasikan dana sebesar Rp.50.000.000,- dan tingkat realisasi Rp.39.483.150,- dengan realisasi fisik 96,67%.

b) Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah laporan kasus yang ditindaklanjuti dengan target sebanyak 10 laporan maka dialokasikan dana sebesar Rp.25.556.500,- dan tingkat realisasi Rp.19.677.500,- dengan realisasi fisik 100%.

c) Asistensi dan Pembinaan Penyusunan PP dan PKB

Indikator kinerja kegiatan ini adalah laporan asistensi dan pembinaan penyusunan PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dengan target kinerja 1 laporan maka dialokasikan dana sebesar Rp.3.061.250,- dan tingkat realisasi Rp.2.932.850,- dengan realisasi fisik 100%.

#### 4.5.Sasaran 4: Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja

Indikator kinerja dari pencapaian sasaran Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja di Kota Bukittinggi adalah:

- Tingkat partisipasi angkata kerja
- Tingkat pengangguran terbuka
- Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.

Berikut analisis capaian kinerja sasaran ini sebagai berikut:

- a. Target tahun 2017 untuk indikator kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) ditargetkan sebesar 70,25% d realisasi 67,59% dengan tingkat capaian sebesar 96,21% yang dikategorikan sangat tinggi. Untuk target tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada tahun 2017 sebesar 5,84% tercapai sebesar 6,04% dengan realisasi103,42% dikategorikan sangat tinggi. Dan untuk indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan ditargetkan sebesar 17% tercapai 29,9% maka tingkat capaian sebesar 175,88% dikategorikan sangat.



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET
5	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,25%	67,59%	96,21%	Sangat Tinggi
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,84%	6,04%	103,42%	Sangat Tinggi
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	17%	29,9%	175,88%	Sangat Tinggi

- b. Untuk perbandingan dengan capaian tahun 2016 dan 2017, dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 67,59% dan capaian realisasi tahun 2017 sebesar 67,59% untuk indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Dan capaian realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,04% dan capaian realisasi tahun 2017 sebesar 6,04% untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Untuk ke dua indikator ini sesuai hasil SAKERNAS (Survey Angkatan Kerja Nasional) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan capaian tahun 2016 sebesar 20,2% dan tahun 2017 sebesar 29,9%. Artinya terjadi peningkatan capaian realisasi kinerja pada indikator kinerja ini bahkan melebihi target yang ditentukan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			2016	2017
5	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,59%	67,59%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,04	6,04%
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	20,2%	29,9%

- c. Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja target indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sampai dengan tahun 2021 yaitu sebesar 77%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar 67,59%, maka realisasi capaian kinerja jangka menengah sampai tahun 2017 sebesar 87,78%. Untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka target indikator sampai dengan tahun 2021 sebesar 4,93%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 6,04%, maka realisasi dari capaian kinerja jangka menengah sampai tahun

2017 sebesar 22,51%. Untuk indikator indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan target jangka menengah sampai 2021 yaitu 25% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 29,9%, maka realisasi dari capaian kinerja jangka menengah yaitu 119,6%.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN S/D 2016 TERHADAP 2021
			2016	2017				
				TARGET	REALISASI	%		
5	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,59 %	70,25%	67,59%	96,21 %	77%	87,78%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,04%	5,84%	6,04%	103,42 %	4,93%	22,51%
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	20,2%	17%	29,9%	175,88 %	25%	119,6%

- d. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Untuk sasaran Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja yang memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan, jika dilihat dari capaian indikator kinerjanya pada tahun 2017 dapat dikategorikan Sangat Tinggi bahkan 2 indikator melebihi target yang telah ditetapkan.

- TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dan Tingkat Pengangguran Terbuka dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai hasil dari Sakerna (Survey Angkatan Kerja Nasional).
- Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2016 sebesar 20,2% dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 29,9% melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase ini diperoleh dengan membandingkan pencari kerja yang ditempatkan dalam hal ini adalah pencari kerja yang mengurus kartu pencari kerja yang memperoleh pekerjaan dengan pencari kerja yang terdaftar yaitu pencari kerja yang mengurus kartu pencari kerja pada periode tahun tertentu. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Pencari Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan**  
**Tahun 2016-2017**

No.	Tahun 2016		Tahun 2017	
	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan
	778	157	1076	322
	20,2%		29,9%	

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja

No.	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja	Sumber Dana
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>		
1.	Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	12 dokumen	APBD
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		
1.	Pelatihan Kewirausahaan	16 orang	APBD
2.	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta	13 lembaga	APBD
3.	Pelatihan Menjahit	16 orang	APBD
4.	Pelatihan Montir Elektronika	16 orang	APBD
5.	Pelatihan Memasak	16 orang	APBD
6.	Pelatihan Pembuatan Meubel	16 orang	APBD
7.	Monev Eks Siswa Pelatihan	20 orang	APBD
8.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Ketenagakerjaan	16 set	APBD

1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah penempatan pencari kerja di Kota Bukittinggi. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program ini Rp.13.504.250,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.13.504.250 (100%).

a) Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja

Indikator kinerja kegiatan Pelayanan dan Penempatan tenaga Kerja adalah jumlah laporan penempatan tenaga kerja sebanyak 12 laporan selama 1 tahun, maka alokasi dana sebesar Rp.13.504.250,- terealisasi sebesar Rp.13.504.250,- dengan realisasi fisik 100%.

2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian, sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja. Program ini dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan jenis pelatihan dan pembinaan yang diberikan untuk pencari kerja di Kota Bukittinggi. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.524.865.100,- dengan realisasi sebesar Rp.501.197.700,- dan tingkat realisasi mencapai angka 95,49%.

a) Pelatihan Kewirausahaan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan kewirausahaan maka dialokasikan dana sebesar Rp.35.470.000,- terealisasi Rp.35.164.250,- dan tingkat realisasi 99% dengan realisasi fisik 100%.

b) Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan monitoring yang dilakukan terhadap Lembaga Latihan Swasta (LLS) maka dialokasikan dana sebesar Rp.9.390.000,- terealisasi Rp.8.648.650,- dan tingkat realisasi 92% dengan realisasi fisik 100%.

c) Pelatihan Menjahit

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan menjahit maka dialokasikan dana sebesar Rp.71.193.000,- terealisasi Rp.71.077.350,- dan tingkat realisasi 99,85% dengan realisasi fisik 100%.

d) Pelatihan Montir Elektronika

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan montir elektronika maka dialokasikan dana sebesar Rp.76.432.400,- terealisasi Rp.72.366.200,- dan tingkat realisasi 94,68% dengan realisasi fisik 100%.

e) Pelatihan Memasak

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan memasak maka dialokasikan dana sebesar Rp.99.872.200,- terealisasi Rp.96.687.100,- dan tingkat realisasi 96,81% dengan realisasi fisik 100%.

f) Pelatihan Pembuatan Meuble

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan pembuatan meuble maka dialokasikan dana sebesar Rp.192.642.000,- terealisasi Rp.178.301.850,- dan tingkat realisasi 92,56% dengan realisasi fisik 100%.

g) Monev. Eks. Siswa Pelatihan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah eks. Siswa pelatihan yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan pelatihan pada tahun sebelumnya maka dialokasikan dana sebesar Rp.3.875.500,- terealisasi Rp.3.752.300,- dan tingkat realisasi 96,82% dengan realisasi fisik 100%.

h) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Ketenagakerjaan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana ketenagakerjaan yang diadakan yaitu 16 set mesin jahit maka dialokasikan dana sebesar Rp.36.000.000,- terealisasi Rp.36.000.000,- dan tingkat realisasi 100% dengan realisasi fisik 100%.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Dari keseluruhan anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp.9.557.426.552,- terserap dana sebesar Rp.8.926.695.228,-(93,40%) yaitu dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.6.336.475.462,- terserap Rp.6.021.061.059,- (95,02%) dan belanjalangsung sebesar Rp.3.220.941.090,- dengan serapan sebesar Rp.2.905.634.229,- (90,21%). Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017**

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Tidak Langsung	6.336.475.462	6.021.061.059	95,02%
Belanja Langsung	3.220.951.090	2.905.634.229	90,21%
<b>Total</b>	<b>9.557.426.552</b>	<b>8.926.695.228</b>	<b>93,40%</b>

Realisasi anggaran dan fisik secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggaran dan Fisik Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2017**

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Non Urusan</b>							
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>							
	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah surat yang terkirim	12 bulan	12 bulan	100%	1,300,000	1,300,000	100.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	36 rek/12 bulan	36 rek/12 bulan	100%	78,900,000	64,946,456	82.31%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	7 unit roda 4 & 14 unit roda 2	7 unit roda 4 & 14 unit roda 2	100%	201,367,000	162,244,220	80.57%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa cleaning service dan pembelian alat kebersihan	12 bulan/ 22 jenis	12 bulan/ 22 jenis	100%	5,500,000	5,102,000	92.76%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan/peralatan/perengkapan kantor (bulan)	1 paket	1 paket	100%	13,220,000	12,905,900	97.62%
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis terbeli (jenis)	36 jenis	36 jenis	100%	12,740,000	12,395,700	97.30%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah yang dijilid dan fotocopy	10 jenis	10 jenis	100%	11,007,000	7,692,625	69.89%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	11 jenis	11 jenis	100%	3,000,000	2,894,000	96.47%

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman lembur, rapat, tamu pelayanan	12 bulan	12 bulan	100%	19,432,000	14,595,408	75.11%
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi	Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	90%	90%	100%	310,000,000	303,983,723	98.06%
	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS dan iuran jasa BPJS	12 bulan	12 bulan	100%	125,657,040	125,424,760	99.82%
	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ	4 paket	4 paket	100%	10,000,000	8,706,500	87.07%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
	Pengadaan Perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	7 jenis	7 jenis	100%	136,995,000	132,508,000	96.72%
	Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	4 jenis	4 jenis	100%	44,000,000	42,947,500	97.61%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pelaksanaan Pemeliharaan rutin gedung kantor yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100%	42,760,000	42,284,000	98.89%
	Pengadaan Meubelair	Jenis meubelair yang diadakan	4 jenis	4 jenis	100%	18,000,000	17,002,500	94.46%
	Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab gedung kantor (unit)	1 paket	1 paket	100%	100,000,000	99,705,000	99.71%
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>							
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah petugas yang profesional di bidang penanaman modal	6 orang	6 orang	100%	70,000,000	45,845,427	65.49%

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis dokumen capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	100%	2,319,000	2,284,600	98.52%
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan persemester yang tersusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	100%	2,229,000	2,049,000	91.92%
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Rencana Kerja yang tersusun tepat waktu	7 dokumen	7 dokumen	100%	3,356,000	3,327,100	99.14%
	<b>Urusan Wajib</b>							
	<b>Penanaman Modal</b>							
	<b>Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat</b>							
	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Laporan Perizinan yang diterbitkan	50 laporan	50 laporan	100%	55,927,100	51,198,775	91.55%
	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jumlah izin yang dikelola secara on line	86 jenis	86 jenis	100%	11,672,200	10,885,500	93.26%
	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Umum dan Teknis	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	3700 berkas izin	3700 berkas izin	100%	3,019,000	2,812,500	93.16%
	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah kasus pengaduan	60 kasus	20 kasus	33.33%	12,337,000	11,003,000	89.19%



No.	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen)	3 dokumen	3 dokumen	100%	12,488,000	11,377,050	91.10%
	Pelayanan Perizinan Umum	Jumlah perizinan umum yang diterbitkan	2500 izin	1738 izin	69.52%	67,593,000	43,046,700	63.69%
	Pelayanan Perizinan Teknis	Jumlah perizinan teknis yang diterbitkan	1200 izin	1610 izin	134.17%	111,063,000	98,429,275	88.62%
	Tim Koordinasi Perizinan	laporan pelaksanaan koordinasi perizinan (dokumen)	1	1	100%	3,930,000	2,316,600	58.95%
	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kali)	90 perusahaan	90 perusahaan	100%	18,201,000	16,985,450	93.32%
	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>							
	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan luar Negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	2 kali	1 kali	50%	117,246,000	47,608,630	40.61%
	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>							
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	1 dokumen	1 dokumen	100%	14,060,000	13,163,500	93.62%
	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UKM	Jumlah pengusaha yang mengikuti sosialisasi	50 orang	50 orang	100%	3,274,000	2,654,000	81.06%
	<b>Tenaga Kerja</b>							

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>							
	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta kewirausahaan (orang)	16 orang	16 orang	100%	35,470,000	35,164,250	99.14%
	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta	Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina (lembaga)	13 lembaga	13 lembaga	100%	9,390,000	8,648,650	92.10%
	Pelatihan Menjahit	Jumlah peserta pelatihan menjahit (orang)	16 orang	16 orang	100%	71,183,000	71,077,350	99.85%
	Pelatihan Montir Elektronika	Jumlah peserta pelatihan montir elektronika (orang)	16 orang	16 orang	100%	76,432,400	72,366,200	94.68%
	Pelatihan Memasak	Jumlah peserta pelatihan memasak (orang)	16 orang	16 orang	100%	99,872,200	96,687,100	96.81%
	Pelatihan Pembuatan Meubel	Jumlah peserta pelatihan pembuatan meubel (orang)	16 orang	16 orang	100%	192,642,000	178,304,850	92.56%
	Monev Eks Siswa Pelatihan	Jumlah peserta monev eks siswa pelatihan (orang)	20 orang	20 orang	100%	3,875,500	3,752,300	96.82%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Ketenagakerjaan	Jumlah sarana pelatihan yang diadakan (set)	16 set	16 set	100%	36,000,000	35,200,000	97.78%
	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>							
	Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	Laporan informasi pasar kerja (laporan)	12 dokumen	12 dokumen	100%	13,504,250	13,504,250	100.00%
	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>							

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah kasus PHK yang tertangani (kasus)	30 kasus	29 kasus	96.67%	50,000,000	39,483,150	78.97%
	Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan	Jumlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin (perusahaan)	10 perusahaan	10 perusahaan	100%	25,556,500	19,677,500	77.00%
	Asistensi dan Pembinaan Peratuan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	PP dan PKB di perusahaan (perusahaan)	5 perusahaan	5 perusahaan	100%	3,061,250	2,932,850	95.81%
	<b>Urusan Pilihan</b>							
	<b>Industri</b>							
	<b>Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</b>							
	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	Jumlah peserta sosialisasi/penerapan Good Manufacturing Practises (GMP) (orang)	5 IKM	5 IKM	100%	10,874,700	10,824,600	99.54%
	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>							
	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi	Jumlah peserta pelatihan aneka sulam, membatik, tenun dan lomba produk unggulan daerah serta fasilitasi dengan mitra kerja industri (orang)	30 orang	30 orang	100%	46,751,400	46,751,400	100.00%
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Fasilitasi mitra kerja industri (jumlah rapat koordinasi yang diikuti;	25 org; 15 org; 25 org; 31 org	25 org; 15 org; 25 org; 31 org	100%	490,097,750	469,252,150	95.75%

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		jumlah peserta study pembelajaran bagi IKM kerajinan; jumlah peserta pameran)						
	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>							
	Perluasan penerapan standar produk industry manufaktur	Peserta sosialisasi penerapan dan konvensi GKM (IKM)	5 IKM	5 IKM	100%	24,374,600	23,572,800	96.71%
		Peserta sosialisasi SNI terhadap produk industri (IKM)	25 IKM	25 IKM	100%			
	Pengembangan & pelayanan teknologi industri	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah industri makanan yang mendapat fasilitas packing (IKM)	25 IKM	25 IKM	100%	99,443,750	81,600,915	82.06%
		Fasilitasi label halal terhadap produk industri makanan (IKM)	10 IKM	10 IKM	100%			
	Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri	Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri (%)	12 bulan	12 bulan	100%	142,299,000	135,240,690	95.04%
	<b>Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>							
	Penumbuhan sentra potensial	Jumlah IKM yang melakukan pendampingan/perkuatan KUB; IKM yang mengikuti produk unggulan daerah (IKM)	5 KUB	5 KUB	100%	10,874,700	10,824,600	99.54%

## **BAB IV P E N U T U P**

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2017 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2017 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan LKIP mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sebagai pengelola urusan penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam urusan penanaman modal bidang perizinan pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan perindustrian dan pelayanan serta penempatan tenaga kerja di Kota Bukittinggi.

Secara umum rata-rata capaian indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2017 dapat dikategorikan Sangat Tinggi, dengan besaran tingkat capaian kinerja 101,21%. Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja dikategorikan Sangat Tinggi, 3 (tiga) indikator kinerja dikategorikan Tinggi dan 4 (empat) indikator kinerja pada kategori Sangat Rendah.

Dengan adanya Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Sehingga dapat menjadi tolok ukur untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan berbagai kebijakan untuk yang akan datang. Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Perbaikan perencanaan dan estimasi penggunaan anggaran sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Membuatkan jadwal setiap kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan tepat waktu;

3. Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dan keahlian pegawai tersebut dalam meningkatkan produktivitas pegawai DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi;
4. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai;
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset .

Bukittinggi, Januari 2018  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN  
DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI



**SYAHRIZAL,ST**  
NIP. 19611212 198602 1 002